



# BAB II

## Perencanaan Kinerja

### **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**

Dokumen Renstra selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran. Selanjutnya renja tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja.

Perjanjian kinerja tahun 2019 merupakan target tahun pertama (transisi) dari renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang tahun 2019-2024. Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang tahun 2019 merupakan transisi dari perjanjian kinerja sebelumnya sehingga terdapat perubahan indikator dan sasaran. Namun pengukuran kinerja dalam LKJIP ini telah diselaraskan dengan sasaran dan target Rencana Strategis yang akan dicapai pada tahun 2019-2024 yang sepenuhnya disesuaikan dengan Indikator Kinerja Utama.



**Tabel 2.1**  
Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang dan Perubahannya








<i>PERJANJIAN Kinerja per 31 Januari 2019</i>				<i>PERJANJIAN Kinerja per 01 Juni 2019</i>		
<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET KINERJA</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET KINERJA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah	Persentase penurunan temuan keuangan yang bersifat materil	55	Meningkatnya akuntabilitas keuangan	Persentase penurunan temuan berulang kode 01, 02 dan 03	30%
		Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, BPKP dan Inspektorat	96,8		Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, BPKP dan Inspektorat	97,20%
		Persentase Perangkat Daerah dengan hasil evaluasi kinerja minimal baik	60	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Persentase perangkat daerah dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja memuaskan	21,43% (9PD)
2	Meningkatnya responsivitas terhadap penanganan kasus/Pengaduan masyarakat	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	93,5		Persentase penanganan kasus/pengaduan masyarakat yang terselesaikan	100%
3	Meningkatnya profesionalisme aparatur pengawasan	Tingkat kapabilitas APIP menurut IACM di level 3	Level 3	Meningkatnya Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi	70
4	Meningkatnya pelayanan yang berorientasi terhadap kepuasan stake holder	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Inspektorat Daerah	75	Meningkatnya profesionalisme aparatur pengawasan	Tingkat kapabilitas APIP menurut IACM di level 3	Level 3



## INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG

Perjanjian Kinerja inilah yang menjadi dasar penyusunan perjanjian kinerja seluruh pegawai di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang, mulai dari level pejabat tertinggi (eselon II) sampai ke pelaksana berdasarkan tugas dan fungsi serta hasil turunan (cascading) dari perjanjian kinerja atasannya. Untuk mewujudkan kinerja tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang mendapat dukungan anggaran dari APBD sebesar Rp 4.323.871.000 yang digunakan untuk melaksanakan 17 kegiatan yang terangkum dalam 7 program sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
Program Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang

Program	Anggaran (Rp.)
 Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	<b>679.791.000</b>
 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	<b>428.831.000</b>
 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	<b>622.000.000</b>
 Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan, dan Pelayanan Informasi	<b>45.000.000</b>
 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	<b>96.450.000</b>
 Program Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	<b>2.168.199.000</b>
 Program Mengentensifkan Penanganan Pengaduan	<b>283.600.000</b>
<b>Jumlah</b>	<b>4.323.871.000</b>



## INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG

Dari beberapa program yang telah ditetapkan tersebut, masing-masing program dirinci lagi dalam beberapa kegiatan dengan perincian sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran

Kegiatan :

- a. Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran
- b. Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran
- c. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan :

- a. Pembangunan/Rehab/Pemeliharaan Gedung Kantor Pengadaan Komputer
- b. Pengadaan/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional
- c. Pengadaan/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan :

- a. Pelaksanaan Bintek/Sosialisasi/Seminar
- b. Peningkatan kapasitas dan profesionalisme tenaga pemeriksa

4. Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan, dan Pelayanan Informasi

Kegiatan :

- a. Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan
- b. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
- c. Peningkatan Pelayanan Informasi Publik

5. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Kegiatan :

Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

6. Program Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Kegiatan :

- a. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
- b. Pencegahan dan pengendalian tindak pidana korupsi
- c. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
- d. Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

7. Program Mengentensifkan Penanganan Pengaduan.

Kegiatan :

Penanganan kasus pengaduan masyarakat di lingkungan pemerintah daerah